

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Objek dari ilmu ekonomi adalah konsumen, produsen dan government. Di mana ke semua objek tersebut akan dipertemukan dalam mekanisme pasar, baik pasar tenaga kerja, pasar barang atau pun pasar modal. Dengan kata lain, mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Sehingga dengan adanya transaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi tersebut. Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah suatu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar.<sup>1</sup>

Pasar, negara, individu dan masyarakat selalu menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi. Menurut ekonomi kapitalis (klasik)<sup>2</sup>, pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan kapitalis adalah *laissez faire et laissez le monde va de lui meme*<sup>3</sup> (Biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri

<sup>1</sup> Adiwirman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Indonesia, The International Institute of Islamic Thought Indonesia, IIIT, 2002, hlm.13

<sup>2</sup> Salah pendiri ekonomi kapitalis adalah Adam Smith (1723-1790) dengan bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, New Rochelle., N.Y : Arlington House, 1966.

<sup>3</sup> Marshall Green, *The Economic Theory*, terj. Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi*, (Jakarta, Bumi Aksara Mandiri, 1997), h.12

sendiri). Maksudnya, biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah *equilibrium*. Jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*inefficiency*) dan ketidakseimbangan.

Menurut konsep tersebut, pasar yang paling baik adalah persaingan bebas (*free competition*), sedangkan harga dibentuk oleh kaedah *supply and demand*. Prinsip pasar bebas akan menghasilkan *equilibrium* dalam masyarakat, di mana nantinya akan menghasilkan upah (*wage*) yang adil, harga barang (*price*) yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah (*full employment*). Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara turun campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu *equilibrium* pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan adil dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar. Para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*self-regulating*).

Sementara itu, sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Max<sup>4</sup> menghendaki maksimasi peran negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari *means of production* sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (*capitalist*) yang serakah sehingga monopoli *means of production* dan melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Karena itu *equilibrium* tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan signifikan untuk mewujudkan *equilibrium* dan keadilan ekonomi di pasar.

Menurut faham ini, harga-harga ditetapkan oleh pemerintah, peredaran barang dikendalikan oleh negara, sehingga tidak terdapat kebebasan pasar. Semua warga masyarakat adalah "karyawan" yang wajib ikut memproduksi menurut kemampuannya dan akan diberi upah menurut kebutuhannya. Seluruh kegiatan ekonomi atau produksi harus diusahakan bersama. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan, termasuk usaha tani, adalah perusahaan negara (*state enterprise*). Apa dan berapa yang diproduksi ditentukan berdasarkan perencanaan pemerintah pusat (*central planning*) dan diusahakan langsung oleh negara.

<sup>4</sup> Pada hakikatnya pemikiran sistem ekonomi sosialis sudah ada sebelum kemunculan Karl Max, seperti Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772-1837), dan Louis Blanc (1811-1882), namun nama sosialis yang termasyhur adalah Karl Marx (1818-1883M), karena ia menggabungkan pemikiran dari banyak ahli yang mendahulainya. Buku Marx yang terkenal adalah *Das Capital* terbit tahun 1867 dan *Manifesto Komunis* terbit tahun 1848.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah Saw sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Islam telah mengharamkan pematokan harga secara mutlak. Anas bin Malik meriwayatkan:

وعن عنس بن مالك قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المعسر، القابض، الباسط، الرزق، وإني لأره أن ألقى الله تعالى ولن أحد منكم يحفظه في دم ولا مال (رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان)

*"Dari Anas bin Malik, ia berkata: "Telah naik harga-harga di kota Madinah pada masa Rasulullah saw. "orang-orang mengatakan: "Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami!" Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, Yang Menyempitkan dan Melapangkan Rezeki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntutku dengan suatu kezhaliman dalam masalah darah dan harta."<sup>5</sup> (W.R. Imam lima, kecuali an-Nasa'iy dan menshahihkannya Ibnu Hibban)*

Di masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi *supply* maupun *demand*. Intervensi pasar yang dilakukan Khulafaur Rasyidin sisi *supply* ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah.

<sup>5</sup> Taghribin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya, Pustaka Litera, 1996, hlm. 212-213.

Sedang intervensi dari sisi *demand* dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme.<sup>6</sup> Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar (*hisbah*). Dalam pengawasan pasar ini Rasulullah menunjuk Said bin Said Ibnul 'Ash sebagai kepala pusat pasar (*muhtasib*) di pasar Mekkah.

Kajian tentang mekanisme pasar telah banyak di bahas oleh para ulama klasik jauh sebelum para ekonom Barat membahasnya. Ulama yang pertama kali membahas mekanisme pasar secara empirik adalah Abu Yusuf, yang hidup di awal abad kedua Hijriyah (731-798). Dia telah membahas tentang hukum *supply and demand* dalam perekonomian. Pemahaman yang seimbang ketika itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang, maka harga akan murah.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa meskipun pada prinsipnya campur tangan (intervensi) langsung pemerintah dalam kegiatan perekonomian perlu dihindarkan, hal itu tidaklah berarti bersifat mutlak dan permanen. Dalam keadaan-keadaan tertentu, campur tangan pemerintah dapat dibenarkan, misalnya dalam rangka menjamin tegaknya keadilan bagi setiap pelaku ekonomi yang bertujuan menjaga kepentingan individu (*self interest*) dalam rangka-kemaslahatan sosial (*social interest*). Hal ini akan membantu meniadakan keharmonisan antara kepentingan diri sendiri dan masyarakat.<sup>7</sup> Campur tangan ini dapat dilakukan pemerintah melalui suatu institusi yang dikenal

---

<sup>6</sup> W. Iqbal Chagwa, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam* judul aslinya (*The Future of Economics: An Islamic Perspective*), Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 103.

dengan sebutan "*al-Hisbah*" (lembaga pengawasan pasar).

Dalam literatur Fikih Islam, Ketika negara ikut campur dalam pematokan harga, maka Allah telah mengharamkannya membuat patokan harga barang tertentu, yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan harga patokan tersebut. Oleh karena itu, pematokan harga tersebut dilarang.

Masalah tidak campur tangannya pemerintah dalam aktifitas perekonomian ini, dapat kita temukan contohnya seperti pada peristiwa pada hadits di atas lonjakan kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok di kota Madinah terjadi. Waktu itu, para sahabat datang kepada Rasulullah dan meminta beliau supaya mematok (menetapkan) harga. Permintaan tersebut ditolaknya, beliau menganggap hal itu (pematokan harga) sebagai suatu kebalighan.

Untuk mengkaji berbagai pemikiran tentang mekanisme pasar yang pernah lahir dari rahim sejarah peradaban umat Islam masa lalu. Apalagi sebagaimana pernah diprediksikan oleh Hezel Handersen, bahwa sistem ekonomi Islam mempunyai peluang yang sangat besar untuk muncul menjadi kebijakan alternatif dalam mencari jalan keluar bagi kemelut ekonomi yang dihadapi dunia dewasa ini.<sup>8</sup>

Hal ini makin penting mengingat kontribusi pemikiran Ulama Klasik masih sangat dipandang perlu sebagai acuan menjawab dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi dalam mekanisme pasar. Maka dari itu penulis

<sup>8</sup> Anas Nuraedin, *Perdagangan Pasar Bebas (Telaah Atas Pemikiran Ibnu Khaldun)*, Tesis 2008, Bandung, 1998, hlm. 5.

tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan mengkaji literatur pemikiran tentang mekanisme pasar menurut tokoh Ulama klasik seorang intelektual muslim yang bernama Ibnu Khaldun. Atas dasar itulah, penelitian ini diberi judul (**Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Ibnu Khaldun**).

## B. Perumusan Masalah

Dalam kaitannya dengan penulisan ini, agar lebih terpusat kepada substansi permasalahan yang akan dikaji, maka pertanyaan-pertanyaan berikut ini diharapkan akan banyak membantu dan mempermudah dalam penelitian ini. Hal tersebut akan penulis formulasikan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Intervensi Pemerintah dalam menetapkan harga menurut Ibnu Khaldun?
2. Bagaimana peranan lembaga pengawasan pasar (*al-hisbah*) menurut Ibnu Khaldun?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

Sebagai jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan utama yang terdapat dalam perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Intervensi pemerintah dalam menetapkan harga menurut Ibnu Khaldun.

2. Peranan lembaga Pengawasan Pasar (*al-hisbah*) menurut Ibnu Khaldun.

## 2. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan Akademik

Memberikan kontribusi bagi eksistensi sistem ekonomi Islam, khususnya yang berhubungan dengan muamalah, tepatnya tentang pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar.

### 2. Kegunaan Praktis

Memberikan kontribusi keilmuan bagi masyarakat mengenai mekanisme pasar yang berkaitan dengan penetapan harga dan lembaga pengawasan *al-hisbah* bagaimana bentuk pemikiran tokoh klasik yaitu Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar.

## 3. Kerangka Berpikir

Ibnu Khaldun berpandangan bahwa ekonomi liberal didasarkan pada prinsip bahwa hendaknya ekonomi dibiarkan bebas tanpa campur tangan atau pengendalian dari negara. Prinsip yang demikian ini telah dikemukakan Ibnu Khaldun jauh sebelum dikemukakan para naturalis Prancis dan Adam Smith di Inggris. Seperti yang telah kita ketahui ada beberapa pemikiran Adam Smith yang menurut orang barat merupakan cikal bakal lahirnya sistem ekonomi liberal. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi liberal itu adalah sebagai



berikut<sup>9</sup>:

1. Pemerintah hanya *invisible hands*
2. Hak milik pribadi diakui
3. Mekanisme pasar
4. Spesialisasi Kerja
5. Adanya Persaingan

Sebagai sebuah model perekonomian yang menekankan perlunya kebebasan individu dalam melakukan berbagai aktifitas perekonomian. Maka Ibnu khaldun mengemukakan teorinya sebagai berikut<sup>10</sup>:

1. Adanya persaingan; Masyarakat akan berhasil memperoleh apa yang mereka inginkan jika adanya kompetisi.
2. Pemerintah hanya sebagai *invisible hand*; campur tangan pemerintah (negara), apalagi yang terlalu agresif ditekan seminimal mungkin agar tidak menghambat pencapaian tujuan tersebut.
3. Mekanisme pasar; lalu lintas perekonomian diserahkan kepada pasar yang alami.
4. Spesialisasi kerja; masyarakat terbagi kepada dua; masyarakat kota dan masyarakat desa.
5. Hak pribadi diakui; setiap individu bebas melakukan produksi.

Pandangan Ibnu Khaldun ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut: Pertama, petani dan pedagang (sebagai pelaku ekonomi) akan

<sup>9</sup> Hassan Djohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1992, hlm. 71.

<sup>10</sup> *Maqalat Ibn Khaldun* (diterjemahkan oleh Ahmadi Thoha). Pustaka Firdaus, Jakarta, 1991, hlm. 171-182.



mendapatkan kesulitan yang sangat besar untuk mendapatkan berbagai kebutuhan (terutama faktor-faktor produksi) yang menjadi tulang punggung utama kelancaran proses produksi mereka. Hal ini terutama disebabkan oleh terlalu kuatnya faktor modal (sumber keuangan) yang dikuasai oleh pemerintah, sehingga mereka (petani dan pedagang) kalah bersaing untuk mendapatkan faktor produksi strategis yang diperlukannya.

*Kedua*, dengan kekuasaan yang dimilikinya, pemerintah dapat menekan harga barang yang dibutuhkannya, hal ini akan merugikan para penjual disebabkan oleh terlalu rendahnya harga jual yang mereka terima, sementara untuk mendapatkan kembali barang-barang produksi yang mereka butuhkan dari pemerintah, mereka harus membayarnya dengan harga beli yang sangat tinggi.

*Ketiga*, perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menimbulkan destruksi peradaban dan disintegrasi dalam negara. Hal ini dapat difahami karena apabila rakyat (sebagai pelaku ekonomi yang sesungguhnya) tidak mau lagi memperbesar modal mereka disebabkan oleh kerugian yang dialaminya, maka pada akhirnya modal itu akan berkurang dan lenyap sebagai akibat terlalu tingginya pengeluaran. Keadaan tersebut akan berdampak negatif terhadap situasi perekonomian suatu bangsa secara keseluruhan.

*Keempat*, kekayaan pemerintah dapat berkembang dan sumber keuangannya dapat meningkat, hanya melalui pendapatan pajak. Sehingga tanpa intervensi secara langsung dalam kegiatan perekonomianpun,

pemerintah dapat memenuhi sumber-sumber keuangannya melalui institusi pajak.

Berdasarkan keempat alasan di atas, maka pantaslah ketika membicarakan masalah penentuan tingkat harga, upah, dan pembagian kerja, Ibnu Khaldun mengembalikan semuanya kepada suatu mekanisme pasar yang bersifat alami.<sup>11</sup>

Ibnu Khaldun menolak campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi tersebut, hal itu bukanlah berarti bahwa ia menganggap pemerintah sebagai aktor yang pasif. Dalam keadaan tertentu, seperti ketika mekanisme pasar kurang dapat berfungsi sebagaimana mestinya ("*market failure*"), yang antara lain disebabkan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para individu pelaku ekonomi, maka (dalam keadaan seperti itu) pemerintah bukan saja boleh, peran ini dapat dilakukan oleh pemerintah melalui suatu institusi yang disebut "*al-Hisbah*" (lembaga pengawasan pasar).

## E. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.<sup>12</sup> Oleh karena itu metode yang digunakan dalam tulisan ini, adalah metode studi pustaka (*library research*). Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Cf. Hasan Bisi, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Logos,

## 2. Jenis Data

Sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data kualitatif: data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Jenis data tersebut, kemudian diklasifikasikan sesuai butir-butir pertanyaan yang diajukan, serta menghindarkan dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut, walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penyusunan tulisan ini terdiri dari dua macam sumber data, yaitu:

- a. Sumber data primer ialah sumber data yang pokok yang dijadikan rujukan utama. Dan yang termasuk kedalam sumber data primer ini adalah: kitab "*al-Muqaddimah*" yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- b. Sumber data skunder ialah sumber data pendukung artinya literatur yang mendukung atau melengkapi terhadap sumber data primer, yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, diantaranya:
  - 1) *Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, karangan Ainur R. Sophian.
  - 2) *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, karangan Fuad Baali

dan Ali Wardi

- 3) *Ensiklopedi Al-Quran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, karangan M. Dawam Rahardjo.
- 4) *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, karangan M. A. Mannan
- 5) *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, karangan Taqyuddin an-Nabhani.
- 6) *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, karangan Yusuf Qardhawi.
- 7) *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, karangan Zainab al-Khudhairi

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai suatu penelitian normatif yang bersumber pada bahan bacaan, maka teknik pengumpulan data dalam tulisan ini dilakukan dengan cara penelitian naskah, terutama berupa studi kepustakaan. Teknik ini disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya, data-data tersebut dapat diidentifikasi untuk membentuk suatu rumusan data yang relevan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan.

#### 5. Analisis Data

Setelah seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian Skripsi ini terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut diuraikan melalui dua tahapan. Pertama, data-data yang telah terkumpul tersebut diseleksi, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tema pokok masalah penelitian, dalam hal ini menyangkut riwayat hidup Ibnu Khaldun, pola pemikiran

ekonominya, pemikiran dan ide-ide ekonominya, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran dan ide-ide ekonominya khususnya tentang mekanisme pasar. Pada tahap kedua, sejauh keadaan memungkinkan akan diteliti untuk membandingkan pemikiran dan ide-ide para pemikir ekonomi lainnya yang dikenal dalam sejarah.

#### E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun atas sistematika sebagai berikut:

Bab I Berupa Pendahuluan, bab ini merupakan uraian singkat dari seluruh bab berikutnya, sehingga akan diketahui kemana arah pembahasan penelitian secara rinci, maka diuraikanlah lebih jelas pada bab berikutnya.

BAB II menjelaskan mengenai landasan teori tentang mekanisme pasar.

BAB III membahas tentang biografi Ibnu Khaldun yang dilengkapi dengan pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun yang berkaitan dengan ekonomi.

BAB IV pembahasan penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan masalah yang ditulis dalam bab satu.

BAB V merupakan penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan